

BAB II

PARIWISATA SEKS ANAK DI KAMBOJA SERTA KERJASAMA PEMERINTAH KAMBOJA DAN ECPAT DALAM MENGATASINYA

Bab ini akan dibagi ke dalam empat sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai sejarah perkembangan sektor pariwisata di Kamboja dan fenomena kemunculan perdagangan seks anak di industri pariwisata Kamboja. Sub bab kedua menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya perdagangan seks anak di Kamboja. Sub bab ketiga menjelaskan tentang sejarah terbentuknya ECPAT dan upaya organisasi tersebut dalam mengatasi perdagangan seks anak di Kamboja. Terakhir, sub bab keempat membahas upaya pemerintah Kamboja dan juga ECPAT bersama-sama dalam menangani perdagangan seks anak di Kamboja.

2.1 Fenomena Kemunculan Perdagangan Seks Anak dalam Industri Pariwisata di Kamboja

2.1.1 Sejarah Perkembangan Sektor Pariwisata Kamboja

Perkembangan sektor pariwisata di Kamboja menurut sejarahnya dimulai saat ketika Pemerintah Kamboja menggeser perekonomiannya menuju ke ekonomi pasar bebas pada tahun 1989 di saat yang sama ketika Pemerintah Vietnam sepakat untuk menarik pasukannya dari Kamboja di bawah tekanan internasional (Puthikar, 2007: 2). Pada pemilu pertama di tahun 1993, yang berada di bawah pengawasan *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC), telah mengubah citra negara Kamboja dari negara yang tidak aman karena mengalami perang yang

berlarut-larut, menjadi negara yang lebih aman dan damai. Hal tersebut kemudian membuka jalan untuk menarik wisatawan asing ke negara tersebut (Puthikar, 2007: 2).

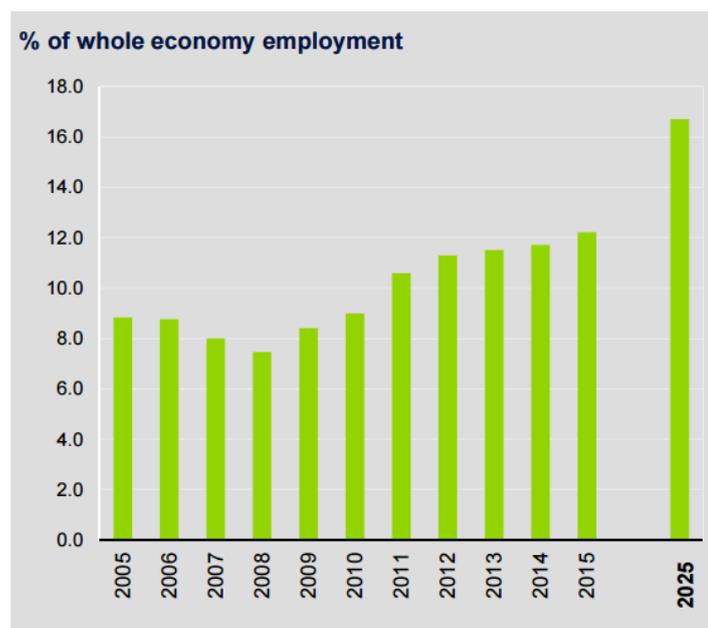
Pariwisata merupakan sektor andalan ke-2 yang ikut menunjang kemajuan perekonomian Kamboja setelah industri tekstil. Setelah tiga dekade mengalami perang saudara dan konflik bersenjata, Kamboja muncul sebagai destinasi wisata baru bagi wisatawan asing dari seluruh dunia (Chheang, 2009: 14). Di tahun 1960-an, Kamboja merupakan salah satu destinasi wisata terfavorit di kawasan Asia Tenggara. Namun selama negara tersebut mengalami perang saudara dan Kamboja dikuasai oleh rezim Khmer Merah, industri pariwisata mengalami keterpurukan.

Setelah konflik berakhir pada awal tahun 1990-an, World Tourism Organization (WTO) mendapati bahwa Kamboja masih dianggap sebagai tempat yang berbahaya untuk *travelling* bagi para turis, ditambah lagi dengan masih kurangnya tempat-tempat wisata yang ada di Kamboja. Selain itu, sektor pariwisata di Kamboja memiliki saingan yang kuat dari negara-negara tetangga (Hall & Ringer, 2000: 178). Namun demikian, selama dekade terakhir ini dengan dukungan yang kuat dari masyarakat internasional, Kamboja kemudian mewujudkan rekonstruksi sosial-ekonomi. Industri pariwisata berkembang sangat pesat di negara tersebut dan pemerintah memandang pariwisata sebagai salah satu penghasil devisa negara dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menunjang pertumbuhan perekonomian Kamboja (Chheang, 2009: 13). Pada *World Economic Forum* (WEF), Kamboja menempati peringkat 96 pada *Travel and Tourism Competitiveness Report* tahun 2007 (World Economic Forum, 2007: xvii).

Sektor pariwisata Kamboja yang terus berkembang membawa pengaruh pada terbukanya lapangan pekerjaan yang ada di Kamboja, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. Pada tahun 2014, sektor *travel and tourism* diperkirakan menghasilkan 11,7% lapangan pekerjaan langsung dari total seluruh lapangan kerja di Kamboja. Sementara di tahun 2015, jumlahnya lapangan kerja di sektor *travel and tourism* meningkat sebanyak 12,2% dari total seluruh lapangan pekerjaan.

Gambar 2.1

**Kontribusi Industri Pariwisata di Kamboja Pada Tersedianya
Lapangan Pekerjaan**



Sumber data: *World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism Impact 2015 Cambodia*

Lapangan pekerjaan tersebut mencakup karyawan yang bekerja di hotel, agen *tour & travel*, maskapai penerbangan dan layanan transportasi penumpang

lainnya (WTTC, 2015: 4). Lapangan pekerjaan yang tersedia dari sektor pariwisata meningkat seiring dengan dikembangkannya sektor pariwisata di negara tersebut.

2.1.2 Kemunculan Perdagangan Seks Anak di Industri Pariwisata Kamboja

Pertumbuhan industri pariwisata di Kamboja yang dipercaya membawa keuntungan bagi perekonomian negara, pada kenyataannya juga memiliki dampak negatif bagi Kamboja, di mana pertumbuhan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kamboja mempengaruhi pertumbuhan wisatawan seks² dan menjamurnya bisnis prostitusi di negara tersebut. (Soubert & Leang Hay, 1995: 12).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Frederic Thomas dan Leigh Mathews (2006: 12), penulis dari *'Who are the Child Sex Tourists in Cambodia'*, mengungkapkan bahwa dari tahun 1975 hingga tahun 1979, prostitusi di Kamboja secara umum dilarang oleh Khmer Merah – penguasa Kamboja saat itu, namun kembali muncul di tahun 1980-an. Kamboja memiliki masa lalu konflik selama lebih dari 30 tahun, termasuk genosida oleh Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot, pendudukan oleh Vietnam maupun Perang Saudara. Pada tahun 1991, *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC) dikerahkan ke Kamboja dalam upaya untuk menstabilkan negara tersebut. Namun sayangnya, *Human Rights Task Force on Cambodia* mengemukakan bahwa kehadiran 22.000 pasukan perdamaian UNTAC yang notabene hampir yang sebagian besar adalah laki-laki, berkontribusi terhadap perkembangan yang signifikan dari industri seks komersial

² Wisatawan seks merupakan istilah bagi wisatawan yang khusus berkunjung ke suatu wilayah atau negara untuk tujuan seks.

Kamboja. Pada tahun 1991, sebelum kedatangan pasukan UNTAC, jumlah pekerja seks komersial di Phnom Penh diperkirakan mencapai 6.000 orang. Selang dua tahun kemudian, jumlah pekerja seks membengkak menjadi lebih dari 20.000 orang di wilayah Phnom Penh saja (Shaw, 2013: 9).

Banyak gadis muda yang diperdagangkan atau dijual ke dalam industri seks untuk memenuhi permintaan dari pasukan UNTAC. Di awal tahun 1993, jumlah pekerja seks komersial menurun setelah kepergian UNTAC dari Kamboja. Namun demikian, dikarenakan tidak adanya sistem peradilan yang berfungsi sebagaimana mestinya dan adanya ketakutan yang meningkat dari masyarakat akan terkena HIV/AIDS, menyebabkan adanya peningkatan eksploitasi seksual komersial anak di negara tersebut (Shaw, 2013: 10).

Sampai sekarang ini, Kamboja dikaitkan dengan pariwisata seks yang telah berkembang seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata yang ada di Kamboja (Jeffreys, 2009: 90). Pariwisata seks dalam perkembangannya dapat ditemukan di berbagai wilayah di Kamboja, seperti Phnom Penh, Siam Reap, Sihanoukville, Battambang dan Banteay Manchev (Tuovinen, 2014: 34). Industri pariwisata seks yang berkembang di Kamboja salah satunya juga melibatkan anak-anak, sehingga kemudian muncul apa yang dikenal dengan Pariwisata Seks Anak (PSA).

Jumlah wisatawan yang datang ke Kamboja telah meningkat secara drastis. Menurut data dari *Statistics and Tourism Information Department in Cambodia*, dari tahun 2003 sampai 2015, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kamboja semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2015 itu sendiri, sebanyak 4.775.231 wisatawan asing mengunjungi Kamboja. Jumlah ini meningkat 6,1% dari

tahun sebelumnya (Ministry of Tourism Cambodia, 2015: 1). Menurut informasi dari Debbie Hankins, selaku *Office Administrator* dari Agape International Missions (AIM), peningkatan jumlah wisatawan asing yang datang ke Kamboja juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya permintaan seks terhadap anak di negara tersebut.

Sektor pariwisata dapat menunjang perekonomian lokal dan memberikan peluang baru untuk menjalankan beberapa bisnis. Hal ini otomatis akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Kamboja. Namun, dengan bentuk baru dari komunikasi seperti internet, stereotip negatif tentang negara dan masyarakat cepat menyebar. Prostitusi anak dilaporkan terjadi dalam jumlah yang signifikan di tempat tujuan wisata utama seperti Siem Reap, Preah Sihanouk dan Phnom Penh, Banteay Mancheay dan Battambang (Defence for Children, 2013: 20).

Anak-anak adalah yang paling dirugikan dalam industri pariwisata seks di Kamboja. Ketika industri pariwisata berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kamboja, di saat yang bersamaan pula anak-anak kehilangan hak-hak mereka (Song, 2004: 2). Banyak anak yang dijadikan korban perdagangan seks untuk memenuhi permintaan industri seks di Kamboja. Para wisatawan seks lebih tertarik terhadap anak-anak karena merasa anak-anak masih jauh lebih aman dari segala penyakit seksual menular (Song, 2004: 3).

Wisatawan seks anak dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni wisatawan seks anak situasional dan wisatawan seks anak preferensial. Wisatawan seks anak situasional sebenarnya tidak memiliki kecenderungan seksual terhadap anak-anak. Karena dia mendapatkan kesempatan untuk berhubungan seks dengan

anak-anak, maka seseorang itu memanfaatkan kesempatan tersebut. Sementara itu untuk wisatawan seks anak preferensial, mereka menunjukkan sebuah pilihan seks aktif terhadap anak-anak walaupun orang tersebut masih memiliki ketertarikan seksual terhadap orang dewasa (ECPAT Internasional, 2008: 12).

2.2 Faktor-Faktor yang Berkontribusi terhadap Munculnya Perdagangan Seks Anak di Kamboja

Ada beberapa faktor yang mempunyai kontribusi besar terhadap munculnya praktek perdagangan seks di Kamboja, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Menurut Amanda Monson yang dikutip dalam *'What is Behind Human Trafficking in Cambodia?'*, sejarah, budaya, kemiskinan, korupsi dan lemahnya penegakan hukum sangat berkontribusi besar pada kemunculan perdagangan seks di Kamboja (Monson, 2009: 1).

2.2.1 Sejarah Tragis Negara Kamboja

Kemunculan perdagangan seks di Kamboja dapat dihubungkan dengan sejarah tragis negara tersebut. Salah satu alasan mengapa *sex trafficking* menjadi sebuah isu di Kamboja adalah karena perang benar-benar telah memporakporandakan negara tersebut dan membuat keadaan menjadi semakin kacau. Kamboja dulunya merupakan *well-developed country*, namun perang saudara yang berlangsung selama beberapa dekade telah menghancurkan kesejahteraan warga negaranya dan menjadikan kemunduran bagi mereka pada banyak aspek. Genosida selama era Khmer Merah tahun 1975-1979 telah

menewaskan sekitar dua juta orang. Masyarakat yang berpendidikan tinggi dan beragama, hampir musnah bersamaan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada. Hanya menyisakan masyarakat yang rapuh setelah rezim Khmer Merah runtuh (Wood, 2014: 9).

Perang berakhir pada tahun 1991, tetapi kerusakan yang ditinggalkan membuat Kamboja sulit untuk memulihkan kembali negaranya. Sebagai dampak dari perang tersebut, banyak tentara dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang tinggal di Kamboja dan bersedia untuk membayar jasa seks. Salah satu pusat *trafficking* terbesar ada di dekat perbatasan Kamboja-Thailand karena banyak tentara yang ditempatkan disana yang membutuhkan wanita. Hingga sekarang, Kamboja telah menunjukkan tanda-tanda pembangunan, namun masih terdapat kesenjangan sosial yang besar. Kamboja tetap menjadi salah satu negara termiskin di Asia (www.thediplomat.com, 2014).

2.2.2 Budaya pada Masyarakat Kamboja

Munculnya prostitusi di Kamboja di dukung oleh budaya negara tersebut yang cenderung berpihak pada kaum lelaki (Samarasinghe, 2004: 88). Kamboja adalah negara yang menganut budaya patriaki.³ Perempuan Kamboja diharapkan untuk menjadi ibu dan istri yang bertugas mendidik dan mengasuh anak, melayani suami serta mengurus rumah tangga. Sementara laki-laki diharapkan untuk bekerja

³ Budaya patriaki memosisikan perempuan pada peran-peran domestik seperti mengasuh, mendidik dan menjaga moral. Sementara itu peran laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan dan pencari nafkah. Dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau *inferior*.

mencari nafkah. Anak-anak perempuan juga sering mendapatkan pendidikan yang kurang dibandingkan anak laki-laki dan tingkat melek huruf kaum perempuan cenderung jauh lebih rendah daripada laki-laki (Monson, 2009: 13).

Kamboja memiliki norma-norma budaya seputar seks. Anak perempuan diharapkan untuk dapat menjaga keperawanannya sampai memasuki jenjang pernikahan. Jika seorang gadis melakukan hubungan seks sebelum menikah – bahkan jika dia diperkosa, gadis tersebut akan dikucilkan dan dipermalukan sehingga lebih baik untuk masuk ke dunia prostitusi saja (Monson, 2009: 14). Korban yang mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual merasa malu dan sering bersalah atas apa yang telah terjadi pada mereka. Di Kamboja, korban pelecehan seksual, pemerkosaan dan eksploitasi seksual mendapat stigma yang buruk dari masyarakat. Mereka seringkali tidak diperlakukan seperti korban kejahatan, tapi seperti pelaku kejahatan.

Ada pepatah yang cukup terkenal di Kamboja, “*Men are Gold: Women are Clothes*” (Samarasinghe, 2004: 89). Seorang lelaki diibaratkan seperti emas, walaupun kotor dan usang ia akan selalu menjadi sesuatu yang berharga. Sedangkan kain yang berwarna putih dapat terkena noda dan mudah kehilangan nilai dan kegunaannya. Pepatah ini sering dikutip dalam literatur tentang perdagangan seks di Kamboja untuk menekankan ketidaksetaraan yang telah mengakar antara laki-laki dan perempuan dalam budaya Kamboja.

2.2.3 Kemiskinan

Faktor lain adalah kemiskinan. Himpitan situasi akibat kemiskinan dapat menyebabkan masyarakat bersedia melakukan apapun demi mendapatkan uang. Sebagai contohnya, sebagian masyarakat Kamboja memiliki keyakinan bahwa anak-anak perempuan berhutang budi pada orang tua mereka dan diwajibkan membantu orang tua nya secara finansial. Hal ini kemudian dijadikan alasan untuk membenarkan penjualan anak perempuan mereka (Monson, 2009: 15). Menurut laporan IOM tahun 2007, ditemukan fakta bahwa beberapa orang tua di Kamboja menjual anak-anak perempuan mereka ke dalam prostitusi dan perbudakan untuk membayar hutang-hutang mereka (US Department of State, 2009: 7).

Dalam sebuah film dokumenter tentang perdagangan seks anak di Kamboja⁴, anak-anak di Kamboja dijual dengan harga US\$ 30 per anak. Sementara untuk anak yang masih perawan, harga jual nya tergolong tinggi yakni sekitar US\$ 1500 per anak. Untuk membuktikan jika seorang anak masih perawan atau tidak adalah wajib membawa sertifikat keperawanan yang di dapat dari rumah sakit. Mirisnya lagi, banyak anak perempuan yang di jual oleh ibu kandung mereka sendiri. Ibu mereka berdalih jika menjual anak perempuan mereka adalah satu-satunya jalan agar dapat terlepas dari jeratan hutang yang semakin menumpuk. Kejadian tersebut mengisyaratkan bahwa kemiskinan dapat membuat orang melakukan hal-hal yang nekat.

⁴ *Project* film dokumenter dari *CNN Freedom Project* yang berjudul “*Every Day in Cambodia*” yang menceritakan kehidupan anak-anak Kamboja yang terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Film documenter ini digagas oleh *CNN Documentary* dan *3Strands Global*.

2.2.4 Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Di sisi lain, korupsi menjadi salah satu hambatan untuk menekan maraknya pariwisata seks anak di Kamboja. *U.S. Departement of State* melalui '*The 2009 Trafficking in Person Report*' mencatat bahwa di Kamboja, korupsi tetap menjadi masalah yang besar. Laporan tersebut membeberkan bahwa beberapa oknum penegak hukum dan pejabat pemerintahan setempat menerima suap agar dapat memfasilitasi kegiatan perdagangan seks anak. Korupsi juga telah menghalangi penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan seks anak tersebut (US Departmen of State, 2009: 96).

Menurut *Transparency International's Corruption Perceptions Index*, Kamboja berada di peringkat 160 dari 175 negara dalam hal korupsi di badan kepolisian. Dikarenakan upah bagi para aparat kepolisian sangat rendah, polisi menjadi sasaran penyuapan oleh para pemilik rumah bordil untuk menghindari penangkapan.

2.3 Sejarah ECPAT dan Kerjasama Pemerintah Kamboja - ECPAT dalam Menangani Perdagangan Seks Anak di Kamboja

End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) adalah sebuah jaringan organisasi global yang dibentuk untuk menghapuskan segala bentuk eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Dilihat dari sejarahnya, ECPAT awalnya merupakan sebuah kampanye yang dibentuk oleh *Economical Coalition in Third World Tourism* di tahun 1990. Kampanye tersebut diadakan pasca munculnya berbagai penelitian tentang masalah

perdagangan anak dan pariwisata Asia di Thailand, Sri Lanka dan Filipina pada tahun 1990 (ECPAT International, 2008: 4).

Dalam sebuah pertemuan internasional yang diselenggarakan di Chiang Mai, Thailand, individu-individu dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap isu perdagangan anak dan pariwisata seks anak tersebut terdorong untuk meluncurkan sebuah kampanye yang bernama *End Child Prostitution in Asia Tourism* atau yang disingkat dengan nama ECPAT. Misi dari ECPAT itu sendiri adalah untuk menggugah kesadaran akan masalah prostitusi anak yang semakin marak terjadi kepada media, institusi negara, polisi dan organisasi internasional (Branfors, 2010: 18).

Pada tahun 1992, ECPAT mempublikasikan buku perdananya yang menguraikan masalah prostitusi anak di negara-negara Asia dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah permasalahan tersebut. Masih di tahun yang sama, ECPAT mengadakan konsultasi internasional pertamanya di Thailand dan diputuskan bahwa prostitusi anak bukan hanya menjadi masalah di negara-negara Asia saja, akan tetapi juga merupakan masalah yang terjadi di seluruh dunia (Branfors, 2010: 19).

Kemudian di tahun 1996, ECPAT mulai berkembang ke berbagai negara di Asia, Eropa dan Amerika Serikat dan resmi berdiri menjadi sebuah NGO yang bergerak dalam menanggulangi perdagangan seks anak di dunia. ECPAT resmi menjadi NGO yang berbasis di Bangkok, Thailand yang saat itu diketuai oleh Ron O'Grady dengan mengubah nama lengkapnya menjadi *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT)*.

ECPAT mengadakan *international assembly* pertamanya di tahun 1999 yang bertempat di Bangkok, di mana lebih dari 50 negara ikut berpartisipasi di dalamnya (Branfors, 2010: 19). Hingga saat ini terdapat 90 anggota ECPAT yang tersebar di 82 negara.

Saat ini, sekretariat ECPAT Internasional dan jaringan ECPAT Internasional masih terus bekerja secara aktif untuk menghapuskan segala bentuk ESKA. Banyak dari jaringan ECPAT yang bekerja untuk mencegah atau memerangi pariwisata seks anak melalui kampanye, sistem pelaporan, penelitian, dan bekerjasama dengan pihak industri pariwisata. Namun banyak juga kelompok ECPAT yang berfokus untuk mencegah bentuk-bentuk ESKA yang lain, misalnya perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, pornografi anak dan pelacuran anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, ECPAT banyak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kamboja. Beberapa kerjasama yang dilakukan keduanya yaitu, antara lain (www.ecpat.org, 2015), (1) ECPAT bekerjasama dengan Dewan Nasional untuk Anak-Anak di tahun 2005 mengadakan berbagai kegiatan yang meliputi pelatihan, lokakarya, dan peningkatan kesadaran akan bahayanya perdagangan manusia dan eksploitasi seksual; (2) ECPAT juga bekerjasama dengan Departemen Pariwisata Kamboja, World Vision Kamboja, dan Child Wise Australia mengadakan lokakarya nasional tentang pariwisata yang aman dari seks anak. Kegiatan ini diikuti oleh Departemen Sosial Kamboja dan perwakilan dari 24 kota dan provinsi. ECPAT juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dalam melakukan lokakarya untuk mencegah pariwisata seks anak; (3)

ECPAT memantau Rencana Aksi Nasional terhadap ESKA (2000-2004); (4) ECPAT dan Pemerintah Kamboja membawa para anak yang menjadi korban perdagangan manusia ke *Cambodia Recovery Centre* untuk mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi.

Selanjutnya yang ke- (5) ECPAT melakukan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk melaksanakan lokakarya pada masyarakat yang bekerja di industri pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan di Phnom Penh dan Siem Riap; (6) ECPAT melaksanakan lokakarya Pariwisata Seks Anak di Battambang yang bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata; (7) dimulai pada tahun 2006, ECPAT memimpin kampanye Pariwisata Seks Anak dan bekerjasama dengan para *driver* tuk-tuk lokal serta dengan *staff* manajemen hotel untuk mengidentifikasi dan melaporkan adanya wisatawan seks asing. Kegiatan kampanye tersebut masih berlangsung hingga sekarang; (8) pada bulan Januari 2015, ECPAT bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata Kamboja, menyelenggarakan sebuah event yang dihadiri oleh perwakilan dari 28 perusahaan swasta dari sektor pariwisata. ECPAT berusaha mendorong perusahaan yang berkecimpung di sektor pariwisata untuk bisa menerapkan kode etik untuk melindungi anak-anak; (9) pada tahun 2014-2015, ECPAT bersama dengan Kementerian Pariwisata rutin menyelenggarakan seminar di Siem Reap yang ditujukan untuk industri kepariwisataan yang dihadiri oleh 26 peserta termasuk pemilik, manajer dan resepsionis hotel (www.ecpat.org, 2015).

Seperti NGO-NGO lainnya, dalam prakteknya ECPAT tidak bekerja sendiri. Selain bekerjasama dengan pemerintah, ECPAT bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti NGO-NGO dengan bidang yang sama, MNC, aparat penegak hukum,

pihak-pihak di industri pariwisata dan berbagai pihak yang *concern* terhadap permasalahan perdagangan seks anak di Kamboja.

2.3 Upaya Pemerintah Kamboja dalam Mengatasi Perdagangan Seks Anak di Kamboja

Perdagangan anak untuk eksploitasi seksual merupakan salah satu kejahatan yang menyangkut hak asasi manusia. Menurut *U.S. Department of State*, lebih dari 2 juta anak dieksploitasi dalam perdagangan seks komersial global setiap tahunnya (US Department of State, 2008). Di Kamboja sendiri, ada sekitar 55.000 pekerja seks di Kamboja yang 31% diantaranya adalah anak-anak yang berumur antara 13-17 tahun (Ryan & Hall, 2001: 31). Hingga saat ini Pemerintah Kamboja terus berupaya untuk mengatasi kompleksitas fenomena perdagangan seks anak yang berkembang di negaranya. Upaya-upaya Pemerintah Kamboja tersebut mencakup skala nasional, regional dan internasional.

2.3.1 Upaya Pemerintah Kamboja pada Skala Nasional

Pemerintah Kamboja memiliki landasan hukum nasional yang menindak kejahatan perdagangan seks anak di Kamboja, antara lain: *the Constitution of Kingdom of Cambodia* (di buat tahun 1993 dan di amandemen tahun 1999); *Laws on the Suppression of Kidnapping, Trafficking, Exploitation of the Human Persons* (1996); *Provisions Relating to the Judiciary and Criminal Law and Procedure Applicable to Cambodia during the Transitional Period* (1992); dan *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* (2008).

Undang-Undang Kamboja tentang *trafficking* yang terbaru yakni *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* yang diratifikasi pada tahun 2008, memiliki ketentuan khusus yang melarang kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak-anak dan dan orang muda. Hukum ini berlaku dengan kekuatan yang sama, baik itu untuk warga negara Kamboja itu sendiri maupun wisatawan asing di Kamboja.

Selain memiliki landasan hukum nasional, Pemerintah Kamboja terus meningkatkan peran dan kerjasama yang terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum dan agen-agen pariwisata. Pemerintah juga melibatkan beberapa organisasi internasional untuk membantu Pemerintah Kamboja dalam mengatasi perdagangan seks anak di industri pariwisata.

Di tahun 2002, Kementerian Dalam Negeri Kamboja mulai mengoperasikan *Cambodia's Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection* yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan pariwisata seks anak. Departemen ini telah mendirikan pos pengaduan di 24 kota dan provinsi (www.un-act.org, 2014). Ketika Kementerian Pariwisata menjadi aktor utama dalam kaitannya dengan pencegahan pariwisata seks anak di Kamboja, Kementerian Dalam Negeri juga membentuk unit *Anti-Human Trafficking*. Kementerian Dalam Negeri mengembangkan *Plan of Action No. 023* pada tahun 2005 yang menguraikan empat langkah konkret untuk memerangi perdagangan manusia dan eksploitasi perempuan dan anak-anak, yakni *prevention and dissemination, law enforcement and suppression, human resource training, dan cooperation with neighbouring countries* (Thomas & Matthew, 2006: 15).

Pada bulan April 2000, Pemerintah Kamboja secara resmi mulai mengadopsi Rencana Nasional (*National Plan*) lima tahun “Menentang Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak”. *National Plan* ini dikembangkan di bawah koordinasi *Cambodia National Council of Children* dan berkonsultasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan juga NGO lainnya. Di bidang perlindungan, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kepolisian untuk melakukan investigasi, penyelamatan para korban, kemudian merujuk korban ke tempat penampungan, menangkap pelaku kejahatan seksual anak dan menyiapkan kasus untuk penuntutan (ECPAT Internasional, 2011: 15).

Pemerintah juga mendirikan *Provincial Inter-Agency Child Protection Committees* di tahun 2002 di berbagai provinsi di bawah naungan *Provincial Department of the Ministry of Social Affairs, Labour, Vocational Training and Youth* (DSALVY). Bekerjasama dengan *Cambodia National Council for Children* (CNCC), Komite dan CNCC berfokus pada menghapuskan pekerja anak dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual komersial. Komite berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelamatkan anak-anak dari rumah bordil dan mengirim mereka ke layanan rehabilitasi dan reintegrasi. Komite ini mendapat dukungan teknis dan finansial dari UNICEF dan ILO (Preece, 2002: 15).

Kamboja memiliki *Cambodia National Council for Children* (CNCC) yang merupakan lembaga pemerintah utama yang menangani masalah anak-anak, yang fungsinya antara lain untuk mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak dan Protokol Opsional pada penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Di

tahun 2010, CNCC membuat upaya untuk mendirikan kantor CNCC di tingkat provinsi, yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak dan Protokol Opsional serta mengumpulkan data yang relevan untuk anak-anak di tingkat lokal. Hingga kini, 14 kantor CNCC telah dibentuk, termasuk di Kompong Chhnang, Oddar Meanchey, Kampot, Kratie, Preah Vihear, Banteay Meanchey, Svay Rieng, Kep, Takeo, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kandal, Pursat and Prey Veng (ECPAT Internasional, 2011: 16).

2.3.2 Upaya Pemerintah Kamboja pada Skala Regional

Kamboja telah membuat *progress* di keterlibatannya dalam kerjasama regional dengan menandatangani dan meratifikasi instrumen penting tentang perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi seksual. Pada tingkat regional, Kamboja telah meratifikasi *ASEAN Declaration against Trafficking in Persons, Particularly in Women and Children*. Kamboja berpartisipasi dalam *Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT)*. Kamboja terus menjadi salah satu pemain utama dalam COMMIT, yang bertujuan untuk mengembangkan kerjasama yang erat antara enam pemerintah negara *Greater Mekong Sub-region* (Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam) untuk memerangi perdagangan manusia di segala bentuk, termasuk perdagangan anak untuk tujuan seksual. Untuk mengoperasionalkan kerjasama ini, COMMIT telah mengembangkan “Rencana Aksi Sub-Regional” setiap tiga tahun sejak tahun 2005, yang masing-masing negara penandatanganan menggunakan sebagai dasar untuk mengembangkan Rencana Aksi yang terfokus pada negara. Laporan tahunan

disusun untuk memantau kemajuan yang dibuat oleh masing-masing negara dalam kaitannya dengan Rencana Aksi COMMIT Sub-Regional.

Kemudian Kamboja juga menyusun dan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan negara-negara tetangga nya untuk mengatasi permasalahan perdagangan anak, yaitu Thailand dan Vietnam. Pemerintah Thailand dan Kamboja juga menyepakati sebuah kerjasama bilateral melalui sebuah MoU yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2003 (CCHR, 2010: 12). MoU tersebut menyediakan kerangka hukum bagi upaya bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah-langkah yang disepakati dalam MoU termasuk antara lain kerjasama Thailand dan Kamboja dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban *trafficking*, menciptakan mekanisme untuk mengurangi tindak kejahatan *human trafficking* dan menghukum para *traffickers* serta melakukan tindakan preventif seperti pelaksanaan program kejuruan dan pendidikan.

Kedua negara tersebut kemudian membentuk *Joint Task Force* untuk memastikan repatriasi yang aman bagi para korban perdagangan manusia dan sepakat melakukan berbagai program kerja yang bertujuan untuk menangani masalah perdagangan perempuan dan anak-anak serta perlindungan penuh bagi para korban (www.asean.org, 2016). Kemudian pada tahun 2005, Kamboja dan Vietnam juga menyepakati MoU untuk menangani masalah *human trafficking*.

Kejahatan ESKA banyak terjadi di beberapa negara anggota ASEAN lainnya seperti Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam dan Kamboja. Karena hal tersebut, cukup banyak upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam memerangi kejahatan ESKA ini. Di tahun 2004, negara anggota ASEAN

menyetujui ‘Deklarasi ASEAN terhadap Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-Anak’ (ECPAT Internasional, 2011: 20).

2.3.3 Upaya Pemerintah Kamboja pada Skala Internasional

Sementara itu sebagai sebuah negara yang patuh terhadap hukum internasional, guna mengatasi aktivitas perdagangan seks di negaranya, Pemerintah Kamboja telah mengadopsi hampir semua instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan eksploitasi seksual komersial anak – kecuali *the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure*. Kemudian ECPAT berusaha untuk terus mendesak Pemerintah Kamboja untuk meratifikasi konvensi tersebut sesegera mungkin (ECPAT International, 2014: 2).

Beberapa konvensi yang telah diratifikasi oleh Kamboja salah satunya adalah *Convention on the Rights of the Child* pada 15 Oktober 1992 dan Protokol Opsional yang menetapkan hak-hak asasi manusia bagi anak laki-laki dan perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual (www.unicef.org, 2009). Konvensi ini merupakan bentuk komitmen negara anggota untuk melindungi anak-anak, tanpa mendiskriminasi siapapun. Selain itu ada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang diratifikasi tahun 1992. CEDAW menetapkan persamaan hak untuk perempuan di berbagai bidang. Setiap negara anggota wajib mengambil langkah yang tepat untuk

menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan juga negara anggota diharuskan membentuk undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan.

Kamboja juga telah memberikan dukungan terhadap Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Pasal 22 ayat 2 menyatakan bahwa ada langkah-langkah yang harus diambil dalam hubungannya dengan masyarakat adat untuk memastikan bahwa para perempuan pribumi dapat menikmati perlindungan penuh dan mendapatkan jaminan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.